

Penyaluran Dana Desa, KPPN Tanjung Gelontorkan Rp 264,01 Miliar di Tiga Daerah Ini



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/08/05/penyaluran-dana-desa-kppn-tanjung-gelontorkan-dana-desa-sebesar-rp-26401-miliar>

Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Hingga 3 Agustus 2023, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung telah menggelontorkan dana desa Rp 264,01 miliar untuk Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kabupaten Balangan.

Tiga daerah ini merupakan wilayah kerja dari KPPN Tanjung dalam menjalankan berbagai program.

Disampaikan Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, realisasi penyaluran dana desa mencapai 73,10 persen dari total alokasi.

Persentase penyaluran tertinggi terdapat pada Kabupaten HSU sebesar Rp 118,55 miliar atau 76,67 persen, diikuti Tabalong sebesar Rp 70,54 miliar atau 72,3 persen dan Kabupaten Balangan Rp 74,92 miliar atau 68,75 persen dari pagu.

Pada tahun ini, KPPN Tanjung mengelola alokasi Dana Desa sebesar Rp 361,15 miliar untuk 488 desa di tiga kabupaten tersebut.

Rinciannya, di Tabalong sebanyak 121 desa, Hulu Sungai Utara sebanyak 214 desa dan Balangan sebanyak 153 desa.

"Alokasi Dana Desa tahun 2023 mengalami kenaikan 0,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 359,83 miliar," kata Sigid, Jumat (4/8/2023).

Diterangkannya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, disebutkan bahwa Menteri Keuangan menetapkan pagu anggaran desa setelah dilakukan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang selanjutnya oleh DJPK dilakukan penghitungan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.

Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap, yaitu sebagian dihitung sebelum tahun anggaran berjalan, dan sebagian dihitung pada tahun anggaran berjalan.

Alokasi yang ada, kata Sigid, terdiri atas pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa dan pagu Dana Desa untuk BLT Desa yang merupakan keperluan BLT Desa selama 12 bulan.

Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa bagi desa reguler dilakukan dalam 3 tahap. Tahap I dan Tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen.

Sementara bagi desa mandiri, penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap I sebesar 60 persen dan tahap II sebesar 40 persen.

Penyaluran dana desa setiap tahapnya dilakukan setelah pemda menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar serta mengajukan permintaan penyaluran kepada KPPN.

“Untuk Tabalong dan HSU sudah tuntas menyalurkan dana desa tahap II. Sedangkan di Balangan masih ada beberapa desa yang belum memenuhi persyaratan penyaluran tahap II. Untuk tahap III, per 3 Agustus, terdapat 31 desa di HSU dan 6 desa di Balangan yang sudah salur,” jelas Sigid.

Sedangkan KPPN Tanjung selaku Financial Advisor terus berupaya untuk mendorong penyaluran dana desa secepat mungkin sehingga dapat segera digunakan.

Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Diharapkan Sigid, dalam penggunaan dana desa agar selalu menjaga prinsip transparan dan akuntabel.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/08/05/penyaluran-dana-desa-kppn-tanjung-gelontorkan-dana-desa-sebesar-rp-26401-miliar>, 5 Agustus 2023.
2. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/wamena/id/layanan/seksi-bank/penyaluran-dana-desa.html>, 8 Januari 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.